

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa bantuan sosial PKH di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga pada pemilu 2024 dipolitisasi. Penelitian ini menemukan dua bentuk politisasi bantuan sosial PKH yang dialami oleh para penerima manfaat PKH, yakni politisasi bantuan sosial PKH dalam bentuk verbal dan non verbal. Politisasi bantuan sosial PKH dalam bentuk verbal ditemukan adanya pemaksaan dan pengancaman untuk memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dengan melakukan pendataan identitas pribadi. Selanjutnya politisasi bantuan sosial dalam bentuk non verbal seperti permintaan penempelan stiker pada setiap rumah para penerima manfaat PKH. Selain itu, konten-konten yang tersebar di media sosial yang menonjolkan program bantuan sosial atau janji sosial adalah bentuk komunikasi non verbal yang mengasosiasikan bantuan sosial PKH dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Praktik politisasi di Desa Kedungjati, ditemukan adanya penggunaan nama pribadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024, tim sukses melakukan kampanye dengan membawa nama instansi pemerintah dan mengaitkan dengan nama pribadi untuk menarik simpati dari para penerima manfaat PKH. Selain itu adanya labelisasi seperti keinginan untuk melabeli rumah para penerima manfaat PKH menggunakan stiker dari salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menunjukkan dukungan politik. Aktor politisasi bantuan sosial PKH merupakan tim sukses dari ketiga calon presiden dan wakil presiden dan tokoh publik yang memiliki kekuasaan.

Tim sukses “Anies-Muhammin” memiliki tingkat keterlibatan paling aktif dan langsung di tingkat desa, memanfaatkan sumber daya paksaan, ekonomi, dan simbolik secara simultan untuk mempengaruhi preferensi politik penerima bantuan sosial PKH secara intensif dan eksplisit. Berbeda dengan tim sukses “Prabowo-Gibran” lebih mengandalkan politik simbolik dan pengelolaan narasi di ranah digital

serta media massa, dengan minim intervensi langsung pada mekanisme bantuan sosial PKH di tingkat desa, menunjukkan strategi kekuasaan yang lebih halus dan terstruktur. Sedangkan, tim sukses “Ganjar-Mahfud” menunjukkan tingkat keterlibatan paling rendah, politisasi bantuan sosial PKH terjadi lebih pada level aktor lokal atau simpatisan, tanpa intensitas tekanan atau manipulasi sistemik yang jelas.

Tim sukses “Anies-Muhaimin”, melakukan praktik politisasi bantuan sosial PKH secara langsung sangat kentara dan intens. Mereka menggunakan tekanan sosial dan ancaman, seperti memaksa penerima bantuan sosial PKH untuk memilih pasangan tersebut. Sedangkan untuk tim “Prabowo-Gibran”, narasi kampanye seperti program makan siang gratis tidak dipolisasi secara langsung di tingkat desa, melainkan diterjemahkan oleh aktor lokal dalam bentuk manajemen simbolik dan narasi secara halus. Jadi, narasi makan siang gratis menjadi simbol harapan dan perwujudan visi politik di kalangan warga, namun tidak dipaksakan secara eksplisit pada penerima PKH. Sementara itu, untuk pasangan “Ganjar-Mahfud”, narasi seperti satu KK satu sarjana juga dimanfaatkan oleh aktor lokal namun bersifat lebih soft dan persuasive. Aktor di desa mungkin mengaitkan program ini dengan pencitraan Ganjar yang merakyat dan fokus pada pendidikan, sehingga membangun dukungan lewat pendekatan kemanusiaan dan empati. Namun, politisasi langsung terkait bansos PKH kurang terlihat, dan penerima bantuan tidak mengalami intimidasi yang nyata.

Narasi nasional dari kedua pasangan ini (Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud) diterjemahkan oleh aktor lokal menjadi bentuk-bentuk pengaruh non-paksaan yang memanfaatkan sumber daya simbolik. Sedangkan tim “Anies-Muhaimin” melakukan politisasi bantuan sosial PKH secara langsung dan eksplisit dengan penggunaan sumber daya paksaan dan ekonomi di tingkat desa yang berujung pada tekanan terhadap penerima manfaat PKH. Hal ini, mencerminkan perbedaan strategi kekuasaan dan politisasi di tingkat akar rumput yang dialami oleh masyarakat Desa Kedungjati secara berbeda tergantung aktor politik yang beroperasi secara langsung.

Hasil penelitian ini secara dominan menyoroti praktik politisasi bantuan sosial PKH oleh elite politik lokal dan tim sukses pasangan calon, temuan signifikan yang tidak kalah penting adalah adanya resistensi dari sebagian penerima manfaat PKH di Desa Kedungjati. Beberapa informan menolak politisasi karena mereka secara sadar memahami bahwa PKH adalah program pemerintah yang bersifat sosial dan tidak semestinya menjadi alat politik. Selain itu, ada dukungan keluarga dan jaringan sosial yang memperkuat sikap kritis mereka terhadap tekanan politik. Fenomena ini menegaskan bahwa penerima manfaat PKH tidak sekadar objek pasif dalam mekanisme politisasi, melainkan memiliki agency yang aktif dalam mengambil sikap kritis dan menolak intimidasi politik. Resistensi ini menjadi penemuan baru yang signifikan dibandingkan studi sebelumnya dan menunjukkan kompleksitas hubungan kuasa di level akar rumput. Adanya sikap kritis dan penolakan ini, ada ruang optimisme untuk pemberdayaan politik yang lebih berimbang dan demokrasi yang lebih substantif.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, strategi yang direkomendasikan untuk mencegah politisasi bantuan sosial PKH dalam pemilu adalah pemberdayaan politik bagi para penerima manfaat PKH. Pemberdayaan politik bagi para penerima manfaat PKH sangat penting. Penerima manfaat PKH perlu memahami bahwa bantuan sosial PKH yang mereka terima adalah hak sebagai warga negara, bukan pemberian pribadi dari kandidat atau partai politik tertentu. Kesadaran ini mencegah mereka terjebak dalam relasi transaksional yang merugikan secara jangka panjang. Pemberdayaan politik membekali para penerima manfaat PKH dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam pemilu, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh janji atau ancaman terkait bantuan sosial PKH.

Tesis ini merekomendasikan agar kebijakan dan program pemberdayaan politik tidak hanya fokus pada pencegahan politisasi bantuan sosial PKH oleh aktor elite, tetapi juga memperkuat kapasitas dan keberdayaan masyarakat penerima manfaat PKH agar mampu mempertahankan hak-hak politiknya secara mandiri dan kritis. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkecil dominasi politik transaksional

dan meningkatkan kualitas demokrasi pada level lokal. Implementasi pemberdayaan politik dapat dilaksanakan dengan melibatkan pelaksana, modul kegiatan spesifik, mekanisme keberlanjutan program, dan implementasi program pemberdayaan politik sebagai berikut:

1. Pelaksana program pemberdayaan politik
  - a. Perangkat desa dan kepala desa sebagai motor utama pemberdayaan, mengingat mereka memiliki legitimasi dan akses langsung ke masyarakat.
  - b. Fasilitator atau pendamping sosial dari pemerintah desa, selain pendamping PKH yang sudah ada, bisa ditugaskan khusus untuk aspek literasi politik.
  - c. Organisasi masyarakat lokal seperti karang taruna, kelompok perempuan, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai mitra partisipatif dalam pelaksanaan.
  - d. Tim relawan literasi politik, yang bisa terdiri dari aktivis lokal, mahasiswa, atau kader partai politik yang independen tapi berorientasi edukasi politik.
2. Modul dan kegiatan spesifik untuk meningkatkan literasi politik masyarakat
  - a. Modul 1: Pengantar demokrasi dan hak politik, materi tentang konsep demokrasi, hak suara, dan pentingnya memilih secara bebas tanpa paksaan. Adakan diskusi kelompok dan simulasi pemilu untuk pengalaman langsung.
  - b. Modul 2: Mengenal sumber daya politik dan politisasi bantuan sosial PKH, berisi penjelasan tentang bagaimana bantuan sosial PKH bisa dipolitisasi dan cara mengenali praktik tersebut. Memberikan edukasi tentang hak penerima bantuan sosial PKH agar tidak dipaksa atau diancam terkait pilihan politik.
  - c. Modul 3: Keterampilan berpartisipasi dalam politik lokal, pelatihan komunikasi efektif dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah desa. Adakan workshop untuk membentuk kelompok diskusi warga dan forum warga desa.
  - d. Modul 4: Pemanfaatan media sosial dan informasi digital, pelatihan literasi digital untuk memverifikasi informasi politik dan menghindari hoaks. Penggunaan media sosial secara cerdas sebagai medium partisipasi dan pengawasan.

- e. Kegiatan rutin, membuat forum warga bulanan tentang isu politik lokal dan pemilu. Penyuluhan dan dialog terbuka dengan calon legislatif atau pejabat terkait serta kampanye anti-politik transaksional dan pelatihan advokasi hak politik.
3. Mekanisme keberlanjutan program
- a. Integrasi dalam Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes), program literasi politik dimasukkan sebagai agenda rutin dalam RPJMDes sehingga mendapat dana operasional dari dana desa.
  - b. Pelibatan institusi pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, berkerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan LSM agar program menjadi program berkelanjutan dan diperbarui sesuai perkembangan situasi politik.
  - c. Pembentukan forum pengawas masyarakat, membentuk kelompok warga yang bertugas memantau dan melaporkan praktik politisasi bantuan sosial PKH. Memberi penghargaan bagi desa dan aparat yang menunjukkan keteladanan dalam mencegah politisasi.
  - d. Pemberdayaan kader lokal, melatih kader literasi politik dari kalangan muda sebagai agen perubahan jangka panjang.
  - e. Evaluasi berkala dan monitoring, mengadakan evaluasi dan pertemuan rutin untuk menilai efektifitas program dan memperbaiki metode. Melibatkan pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk monitoring dan pendampingan.
4. Implementasi program pemberdayaan politik
- a. Kepala Desa dan perangkat ditugaskan sebagai koordinator program yang memfasilitasi pelaksanaan tiap modul, bekerjasama dengan fasilitator khusus literasi politik yang telah mendapat pelatihan.
  - b. Modul disusun dengan bahasa sederhana dan metode partisipatif seperti diskusi, role-playing, dan praktik langsung agar mudah dipahami masyarakat yang mungkin memiliki latar belakang pendidikan terbatas.
  - c. Kegiatan rutin menjadi sarana untuk menjaga interaksi dan pembelajaran berkelanjutan serta membangun budaya politik yang sehat di desa.

- d. Media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi dan edukasi, termasuk live streaming forum diskusi agar menjangkau masyarakat yang sulit hadir secara fisik.
- e. Pengawasan dan evaluasi dilakukan bersama warga dan lembaga terkait untuk transparansi dan akuntabilitas program.
- f. Dana desa dialokasikan khusus untuk mendukung pelaksanaan dan pelatihan penerus kader literasi politik agar program tidak berhenti saat kepemimpinan desa berganti.

Pemberdayaan politik dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya berhenti sebagai program sesaat tetapi menjadi sebuah gerakan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mencegah politisasi bantuan sosial PKH, dan memperkuat demokrasi lokal secara nyata. Adanya pemahaman politik yang baik, para penerima PKH dapat menjadi pengawas jalannya program, melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan atau tekanan politik dari pihak manapun. Penerima manfaat PKH yang berdaya secara politik tidak mudah dimobilisasi untuk kepentingan elektoral jangka pendek. Mereka mampu membedakan antara kebijakan negara dan kepentingan politik praktis, sehingga distribusi bantuan sosial tetap tepat sasaran dan adil. Pemberdayaan politik untuk para penerima manfaat PKH adalah kunci untuk mencegah politisasi bantuan sosial pada pemilu. Peningkatkan kesadaran, partisipasi kritis, dan pengawasan, para penerima PKH dapat memastikan bahwa bantuan sosial PKH yang mereka terima benar-benar untuk kesejahteraan, bukan alat politik sesaat.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran politik bagi para penerima manfaat PKH merupakan langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sosial PKH dalam proses demokrasi. Program pemberdayaan politik yang mencakup hak pemilih, kemandirian kesejahteraan, dan bahaya politisasi kesejahteraan harus diperluas di dalam masyarakat. Penerima manfaat PKH yang lebih kritis dan percaya diri dapat mengurangi politisasi bantuan sosial PKH dan memastikan demokrasi yang sehat dan inklusif. Upaya ini dapat memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.